

Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim (Studi Kasus: *Extinction Rebellion* Indonesia)

Dina Natasha¹

Diserahkan: 26 November 2021 | Diterima: 23 Mei 2022 | Diterbitkan: 16 Juni 2022

Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk mengidentifikasi sebuah fenomena baru dalam pergerakan isu krisis iklim di Indonesia. Menggunakan teori gerakan sosial baru sebagai pisau analisis, penelitian ini mengambil strategi gerakan sebagai fokus utamanya dengan studi kasus Extinction Rebellion Indonesia (XR Indonesia). Tidak seperti Extinction Rebellion Pusat, penelitian ini menyimpulkan Extinction Rebellion Indonesia memilih strategi keterlibatan kritis (critical engagement) sebagai cara paling efektif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya isu krisis iklim di Indonesia.

Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru; Strategi Gerakan Sosial Baru; *Extinction Rebellion* Indonesia

1 Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Email: dina.natasha@mail.ugm.ac.id.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas kemunculan gerakan baru, *Extinction Rebellion* Indonesia (XR Indonesia), dalam isu krisis iklim di Indonesia. Fenomena ini penting untuk dibahas lebih lanjut, sebab penelitian mengenai *Extinction Rebellion* (XR) umumnya masih banyak dilihat melalui kaca mata global dan belum ada yang membahas lebih lanjut perihal XR Indonesia.

Bertahun-tahun, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) sudah menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Mengutip Trebicky dalam Kurnia Novianti (2013), cara kerja NGO lingkungan adalah dengan mengampanyekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, hutan misalnya atau mengambil peran sebagai fasilitator dengan cara mengajak masyarakat untuk menanam pohon secara bersama-sama. Namun, XR ternyata memantik pola baru dalam bidang isu krisis iklim, yaitu melalui gerakan sosial yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyusun agenda, propaganda, dan bersuara perihal krisis iklim.

Neil Gunningham (2019) dalam tulisannya menuturkan perihal peran penting gerakan sosial dalam

memengaruhi pencegahan krisis iklim. Menurutnya, teknologi yang sudah berkembang tidak dapat berpengaruh banyak tanpa perubahan sikap politik terhadap krisis iklim dan hal ini dapat didukung dengan perubahan dari luar sistem.

Studi Wahyu Rozzaqi Ginanjar dan Ahmad Zakky Mubarrok (2020) juga melengkapi studi sebelumnya bahwa XR memiliki keterlibatan di luar struktur formal tata kelola global. Hal ini dikarenakan tanpa komitmen politik, revolusi rendah karbon hanya akan menjadi rencana tanpa aksi nyata.

Dikarenakan penelitian-penelitian terdahulu dilakukan dalam lingkup global, maka tulisan ini hadir untuk menjelaskan fenomena XR pada lingkup yang lebih kecil, yakni di Indonesia. Penelitian ini menarik untuk diangkat karena penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana XR Indonesia, sebagai gerakan sosial baru, memberi pemahaman kepada masyarakat akan isu krisis iklim dengan pendekatan secara lebih dekat dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *case study* dan XR Indonesia diangkat sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan studi kasus tersebut, penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana strategi

XR sebagai gerakan sosial baru yang menjadi ruang baru agar masyarakat turut andil, bergerak, dan bersuara secara langsung perihal kegentingan krisis iklim yang terjadi.

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dari bulan Mei 2021 sampai Oktober 2021. Data primer didapatkan dari hasil observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengikuti rangkaian webinar daring yang dilakukan oleh XR Indonesia sebanyak dua kali (XR 101) dan wawancara yang dilakukan pada bulan Juni 2021. Data sekunder berupa jurnal, buku, artikel, media massa, serta literatur pendukung lainnya. Setelah proses tersebut, data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam.

Untuk itu, tulisan ini dibagi ke dalam beberapa topik diskusi, yaitu bagian pertama akan mengidentifikasi kemunculan XR sebagai salah satu gerakan sosial baru. Bagian kedua akan menjelaskan munculnya XR Indonesia sebagai ruang baru Bergeraknya masyarakat Indonesia dalam isu krisis iklim. Bagian ketiga akan menjabarkan analisis dari strategi yang digunakan XR Indonesia untuk memengaruhi kesadaran masyarakat atas gentingnya krisis iklim dan bagian terakhir tulisan

ini akan mendeskripsikan kesimpulan dari pembahasan pada topik-topik sebelumnya.

KRISIS IKLIM: PERMASALAHAN BERSAMA

Gerakan sosial lahir sebagai wadah masyarakat untuk menuntut atau pun menentang suatu perubahan. Giddens (1993) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga mapan.

Sujatmiko menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai suatu bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama (Oman, 2010).

Seiring berjalannya waktu, wacana perihal gerakan sosial pun berkembang, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Rajendra Singh (2010) menjelaskan jika gerakan sosial lama dicirikan dengan wacana ideologis yang meneriakan “anti

kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas.” Sebagaimana tercermin dari gerakan kaum buruh, maka gerakan sosial baru menghindari pilihan ini dan menetapkan tujuan-tujuan non-ekonomis material.

Mengutip Oman Sukmana (2016), gerakan sosial baru tidak berfokus pada satu diskursus ideologi tertentu, seperti gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru bergerak meliputi pluralitas isu tanpa kelas, seperti anti rasis, anti nuklir, feminisme, lingkungan, kebebasan individu, dan perdamaian. Begitu pun dengan isu krisis iklim.

Umumnya, kemunculan gerakan sosial dimulai dari ketidakpuasan masyarakat akan sistem yang sedang berlangsung. Kekecewaan masyarakat terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan yang tidak dirasa tepat dapat mendorong lahirnya gerakan sosial yang mencoba untuk menciptakan suatu perubahan secara lebih menyeluruh. Menurut Singh (2010), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam kasus ini, isu krisis iklim menjadi latar belakang munculnya XR.

Isu krisis iklim menjadi isu bersama karena perubahan ini berdampak signifikan ke tatanan

kehidupan manusia. Sebagai contoh, melelehnya es di kutub bukan saja membuat makhluk hidup yang tinggal di sana kehilangan habitatnya, tetapi juga hilangnya beberapa pulau di bumi akibat naiknya permukaan air laut termasuk pulau-pulau di Indonesia. Prof Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bengen, Guru Besar Tetap FPIK-IPB, memperkirakan sekitar 2.000 pulau di wilayah Indonesia terancam tenggelam pada tahun 2030 akibat dari laju ekstrem iklim global (Republika, 2017).

Selain itu, bencana alam lainnya seperti kekeringan panjang, banjir, kebakaran hutan, akan marak terjadi di berbagai wilayah. Di pertengahan tahun 2021, sudah banyak bencana alam terjadi di berbagai belahan dunia. NOAA Climate.gov memberitakan pada tanggal 23 Juni 2021, Amerika Serikat dan Kanada mengalami Juni terpanas dalam catatan sejarah. Lalu, pada tanggal 12 Juli 2021, Eropa mengalami banjir bandang di Jerman. Banjir tersebut menjadi bencana alam terburuk di Jerman sejak enam dekade terakhir. Setelah itu, tanggal 19 Juli 2021, Cina mengalami banjir karena curah hujan pada hari itu setara dengan curah hujan sepanjang tahun. Dilaporkan 200.000 orang dievakuasi dan 33 meninggal dunia. Adapun pada tanggal 31 Juli 2021, salju langka turun di Brazil yang merupakan negara

tropis. Terakhir, pada tanggal 1 Agustus 2021 kebakaran terburuk dalam satu dekade ini terjadi di Turki. Hampir 95.000 hektar lahan dengan 550 orang korban luka dan 6 orang korban jiwa.

Tak hanya bencana alam, pancaroba juga memiliki dampak bagi kesehatan masyarakat. Influenza, diare, dan demam berdarah sering dijumpai di lokasi dengan curah hujan ekstrem akibat pergeseran iklim. Bahkan, studi terbaru oleh London School of Hygiene & Tropical Medicine atau LSHTM (2021) mengatakan, bahwa lebih dari delapan miliar orang berisiko terkena malaria dan demam berdarah (DBD) pada 2080 karena krisis iklim. Dari dampak kesehatan, persoalan-persoalan sosial lainnya pun bermunculan.

Melalui deskripsi singkat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat kebijakan belum memiliki keseriusan dan perhatian khusus dalam mengatasi isu krisis iklim. Konferensi-konferensi yang diadakan negara-negara dari berbagai belahan benua tak kunjung membuahkan hasil. Dalam situasi ini, tekanan dari luar sistem sangat dibutuhkan.

Sejarah menunjukkan bahwa tekanan harus muncul dari bawah. Dalam prosesnya, tekanan ini membutuhkan gerakan para aktivis di tingkatan akar rumput. Keohane

dan rekan-rekannya berargumen bahwa tekanan dari tingkatan akar rumput di tatanan lingkungan demokrasi yang terindustrialisasi lebih besar kesempatannya untuk memengaruhi arah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat internasional (Kimball, Haas, Keohane, dan Levy, 1996).

Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan masyarakat yang mulai menyuarakan gentingnya krisis iklim yang saat ini sedang berlangsung. Seperti pada tahun 2017, gerakan-gerakan yang bergerak di isu iklim sudah bermunculan di London. Salah satunya adalah “*Stop Killing Londoners*” yang mengampanyekan kota anti polusi. Namun, gerakan tersebut belum berhasil mendapatkan daya tarik politisi ataupun media massa.

Pada bulan Oktober tahun 2018, Roger Hallam, seorang aktivis lingkungan dari Wales, beserta Gail Bradbrook dan Simon Bramwell menginisiasi suatu gerakan baru bernama *Extinction Rebellion* (XR). Gerakan ini dibentuk atas ketidakpuasan efektivitas protes-protes lingkungan dengan cara konvensional dan kurangnya tindakan yang diambil dari pihak pemerintah untuk meminimalisir terjadinya krisis iklim. Dalam pengantar dokumen yang diterbitkan oleh XR

pada Oktober 2019, kelompok tersebut mendefinisikan dirinya sebagai berikut.

“Extinction Rebellion is an international movement that uses non-violent civil disobedience in an attempt to force institutions to act on the climate emergency, and minimise the risk of social collapse.” (Extinction Rebellion, 2019).

Belajar dari gerakan-gerakan sebelumnya, melansir Matthew Taylor (2020), Bradbrook menyatakan bahwa kampanye XR bukan hanya menjadi isu orang-orang progresif yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan sosial, melainkan juga berusaha menyentuh orang-orang tradisional-konservatif perihal keamanan nasional dan perlindungan keluarga.

Maka dari itu, tujuan yang ingin dicapai oleh XR diringkas menjadi tiga tuntutan. **Pertama**, *Tell The Truth*. Pemerintah harus mengatakan yang sebenarnya tentang iklim dengan mendeklarasikan keadaan darurat iklim dan ekologi, juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengomunikasikan urgensi perubahan. **Kedua**, *Act Now*. Pemerintah harus bertindak sekarang untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi nol bersih pada tahun 2025. **Ketiga**, *Go Beyond Politics*. Pemerintah harus menciptakan dan mengambil

keputusan tentang iklim dan keadilan ekologis dipimpin oleh keputusan Majelis Warga.

Berdasarkan tuntutan yang dibuat, XR berusaha menyentuh pluralitas isu dengan membentuk wacana yang lebih representatif. Mereka menekankan realitas lapangan dengan fakta ilmiah terkait krisis iklim terkini dan membawa konsep “darurat iklim” bukan hanya “perubahan iklim” untuk memengaruhi sudut pandang publik.

XR pun melakukan aksi pertamanya, “*Declaration of Rebellion*”, di luar Gedung Parlemen Inggris di London pada tanggal 13 Oktober 2018. Taktik yang digunakan XR adalah tindakan sengaja melanggar hukum, bahkan tindakan tersebut menyebabkan pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi setempat. XR melihat taktik tersebut merupakan taktik protes yang efektif. Gagasan di balik itu adalah bahwa melanggar hukum seperti memblokir jalan atau jembatan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian oleh sebagian besar penduduk.

Pendekatan isu yang membawa berbagai sudut pandang dan taktik penangkapan aktivis yang digunakan oleh XR terbukti efektif mencuri perhatian publik. Beberapa bulan kemudian, XR kembali membuat aksi

untuk memblokir lima jembatan yang melintasi Sungai Thames (Devdiscourse, 2018).

Dengan strategi penangkapan massal, XR tak hanya berhasil mendapat perhatian masyarakat, tetapi juga berhasil membuat pemerintah Inggris terdisrupsi. Pada bulan Mei 2019, perjuangan isu yang dikawal XR membuahkan hasil. Parlemen Inggris akhirnya mendeklarasikan krisis iklim. Propaganda yang dilakukan XR memantik pergerakan global. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, XR menjadi berita utama di seluruh dunia dengan mengorganisir gelombang protes di enam puluh kota (Guardian, 2019). Setelah itu, kelompok-kelompok XR lainnya bermunculan di kota-kota, daerah-daerah, dan negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

MENOLAK PUNAH: *WELCOME TO THE REBELLION*

Perubahan iklim yang kian hari terlihat jelas dampaknya mencuri perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (United

Nations Framework Convention on Climate Change) dan Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto.

Berlanjut pada tanggal 22 April 2016, Indonesia menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasinya pada tanggal 31 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Namun, sangat disayangkan kebijakan iklim di Indonesia masih jauh dari kata serius terutama ketika Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) disahkan yang dirasa tidak berpihak kepada peninjauan krisis iklim. Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Walhi (2020) dalam pernyataan sikapnya juga menyatakan terdapat lima hal yang menunjukkan kebijakan iklim di Indonesia tidak ambisius dan serius dalam menanggapi krisis iklim, yaitu kebijakan iklim Indonesia tidak merefleksikan sains

terbaru, ekspor Indonesia masih tergantung pada ekstraksi sumber energi kotor, aksi mitigasi perubahan iklim Indonesia didominasi solusi palsu yang tidak menjawab akar persoalan dan melanggengkan praktik *business as usual*, kontradiksi kebijakan iklim dengan kebijakan terbaru seperti revisi UU Minerba dan UU Cipta kerja, dan terakhir kebijakan iklim Indonesia tidak berorientasi pada pemenuhan hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tidak mencerminkan keadilan antar generasi.

Padahal, dalam Perjanjian Paris (2016), Indonesia menyetujui untuk menargetkan penurunan emisi karbon dioksida sebesar 29% dengan usaha sendiri (CM1) dan sebesar 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Penelitian tersebut juga memperkirakan emisi Indonesia akan mencapai 2,5 miliar ton CO₂ pada tahun 2020 dan 3,3 miliar ton pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan saat ini.

Hal ini diperkuat dengan semakin maraknya bencana yang terjadi di Indonesia. Melansir data Sepekan Iklim Indonesia oleh *Extinction Rebellion* Indonesia (2021), yang memberitakan pada tanggal 03 Oktober 2021, sejumlah daerah di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dilanda banjir yang menyebabkan ratusan pemukiman

warga terendam. Sekurangnya, 237 unit rumah dan fasilitas publik terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Lalu, pada tanggal 04 Oktober 2021, curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan beberapa desa di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terkepung banjir. Sebanyak 450 jiwa terpaksa mengungsi untuk sementara waktu.

Sebelumnya, di Indonesia kelompok-kelompok yang menyuarakan isu kerusakan alam yang berpengaruh kepada kerusakan iklim memang sudah ada. Organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi perantara masyarakat dengan pemerintah sudah bertahun-tahun menyuarakan isu lingkungan, seperti Greenpeace Indonesia atau Walhi, yang bahkan sudah menyuarakan isu kerusakan lingkungan sejak tahun 1990-an. Mereka mengadvokasikan isu-isu lingkungan dengan cara membuat petisi, diplomasi, lobi, dan cara-cara konvensional lainnya. Namun, hingga saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia masih jauh dari meninjau dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi keresahan tersebut.

Melihat orang-orang di dunia mulai bertindak langsung untuk memprotes negaranya masing-

masing, lahirlah *Extinction Rebellion* Indonesia. Gerakan ini bermula dari Nandi, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di Inggris. Melihat XR dapat menggerakkan hampir seluruh lapisan masyarakat di Inggris, sekembalinya ke Indonesia, ia bersama teman-teman lain yang resah dengan keadaan Indonesia membentuk *Extinction Rebellion* Indonesia (XR Indonesia) pada bulan Juli tahun 2019.

XR Indonesia sendiri merupakan gerakan yang bersifat desentralisasi.

“Hal-hal yang bersifat administratif, seperti logo, font, dan desain disamakan atau diseragamkan dari pusat (Inggris). Sementara itu, untuk isu yang diangkat, arah gerakan, dan pengembangan gerakan itu sendiri dikembalikan ke masing-masing gerakan XR.” (Melissa, 30 Juni 2021).

Penjelasan isu yang dibawa pun disesuaikan dengan konteks negara masing-masing. XR Indonesia (2020) dalam panduan pergerakannya berusaha menjelaskan, mengapa masyarakat Indonesia perlu memberontak? Dalam uraiannya, XR Indonesia mengatakan bahwa sains dan bukti nyata sudah menunjukkan krisis iklim yang sedemikian parah berdampak besar terhadap Indonesia dan tidak hanya belum beraksi secara serius, pemerintah terus mengeluarkan ketidakbijakan yang

memperburuk situasi sekarang, yang secara langsung mengancam keberlangsungan hidup kita. Dengan kata lain, sistem yang rusak ini tidak bisa terus berlanjut. Oleh sebab itu, jalan yang perlu ditempuh adalah pemberontakan.

Adapun tuntutan XR Indonesia adalah pertama, sebarakan kebenaran. *Extinction Rebellion* Indonesia menuntut pemerintah untuk menyebarkan kebenaran mengenai situasi kritis perubahan iklim dengan menyatakan deklarasi darurat krisis iklim. Selain itu, XR meminta pemerintah agar dapat bekerja sama dengan media massa dan lembaga pendidikan untuk mengomunikasikan semua informasi terkini tentang krisis iklim kepada publik untuk mendorong urgensi perubahan.

Kedua, bertindak sekarang. XR Indonesia menuntut pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mengikat secara hukum dalam menurunkan net emisi karbon sampai angka nol di tahun 2025, disertai dengan rencana dan target tahunan karena XR menyadari bahaya dalam memiliki target net 0 di tahun yang masih jauh karena akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk melempar tanggung jawab ke pemerintahan berikutnya.

Ketiga, melampaui politik. XR Indonesia menuntut pemerintah untuk membentuk balai masyarakat yang dipilih secara adil, acak, dan representatif untuk mengawasi dan memimpin semua perubahan kebijakan yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis iklim sebagai perwujudan demokrasi. Balai masyarakat yang dimaksud akan dilakukan melalui diskusi dan deliberasi, dengan arahan para ahli dengan informasi yang lengkap untuk meraih rangkaian kebijakan yang akan menjadi kerangka kerja pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan krisis iklim dan ekologis, juga untuk penanganan karbon emisi di Indonesia yangmana berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia dan global.

Sebagai gerakan sosial baru, isu yang diangkat oleh XR Indonesia bukanlah isu perjuangan suatu kelas tertentu. Isu krisis iklim adalah isu lintas kelas dengan dasar perjuangan hak untuk hidup dengan layak. Oleh karena itu, cakupan anggota XR Indonesia pun lebih luas. Anggota XR Indonesia tidak terpusat di satu kota tertentu. Anggota XR Indonesia tersebar dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur, dengan rentang usia yang juga luas dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja.

Layaknya gerakan sosial baru lainnya, sifat keanggotaan XR Indonesia pun lebih cair dan tidak kaku. Mereka tidak memiliki rekrutmen khusus, peraturan, atau pun dasar hukum untuk bergabung menjadi anggotanya. Itulah keuntungan gerakan sosial baru. Mereka jauh lebih bebas dan dapat membangun kerja sama lebih baik antar sesama, baik itu dengan gerakan sosial lainnya ataupun dengan negara dan swasta. Di XR Indonesia, siapa pun yang merasa bernilai, berprinsip, dan bervisi sama dengan XR Indonesia sudah otomatis menjadi anggota.

XR Indonesia memiliki 10 nilai dan prinsip, yakni pertama, XR Indonesia memiliki visi perubahan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang layak ditinggali untuk generasi-generasi yang akan datang dan penuh akan keadilan untuk semua penghuni bumi. Kedua, menetapkan misi yang sama, yaitu mengorganisir melalui momentum dengan tujuan menggerakkan setidaknya 3,5% dari populasi Indonesia. Ketiga, melestarikan budaya regenerasi, yaitu menciptakan kebudayaan yang sehat, kokoh, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Keempat, secara konsisten menantang diri sendiri dan sistem yang rusak, yaitu mempunyai kesediaan meninggalkan zona nyaman demi mengubah sistem yang telah merusak, membahayakan,

dan menindas keberlangsungan hidup dalam segala cara.

Kelima, belajar dan refleksi diri secara terus-menerus, yaitu memberlakukan siklus bekerja yang reflektif. Refleksi juga diterapkan dari cerita gerakan-gerakan sekitar dan pengalaman masing-masing untuk menjadi suatu pembelajaran. Keenam, menghargai dan menerima semua orang, yaitu bekerja secara aktif untuk menciptakan sebuah lingkungan bekerja yang aman, ramah, dan inklusif. Ketujuh, mendistribusikan kekuasaan secara aktif, yaitu menentang konsep kekuasaan hierarkis agar semua individu dapat berpartisipasi secara adil. Kedelapan, menghindari kultur yang menyalahkan satu sama lain, yaitu sistem yang rusak adalah sesuatu yang tidak dapat dibebankan kepada satu individu saja. Kesembilan, gerakan yang menentang kekerasan, yaitu menentang semua bentuk kekerasan dengan segala cara saat bergerak untuk menghadirkan perubahan yang sistemis. Terakhir, organisasi berbasis otonomi dan bebas dari kekuasaan terpusat.

Selain itu, hal yang menarik dari XR Indonesia adalah struktur keanggotaan yang terbagi menjadi tiga kelompok. **Pertama**, *working group*. Sebagai gerakan sosial baru, *Extinction Rebellion* tidak memiliki

struktur kepengurusan yang kaku, dimana terdapat ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan lainnya. Dalam kegiatannya, XR Indonesia pun kerap kali mengingatkan ke sesama anggota bahwa semua anggota itu setara. Tidak ada hierarki pun penokohan.

Meski demikian, XR Indonesia tetap butuh koordinator-koordinator untuk menjadi pengawas dan pengkoordinir divisi-divisi dalam *working group* yang berfungsi untuk menjaga api pergerakan. Biasanya, setiap divisi memiliki dua koordinator di setiap satu masa jabatan.

“Satu kali masa jabatan koordinator adalah tiga bulan. Khusus untuk koordinator, terdapat peraturan maksimal dua kali masa jabatan untuk menghindari penokohan dan sebagai bentuk regenerasi gerakan.” (Tiara, 2021).

Berbicara mengenai koordinator divisi, terdapat lima divisi dalam *working group* XR Indonesia, yaitu divisi *outreach* yang berfungsi seperti divisi hubungan masyarakat. Divisi ini mencoba menjangkau kolaborasi baik dengan sesama gerakan ataupun instansi lainnya. Pun sebaliknya, divisi *outreach* lah yang menerima bentuk kerja sama dari pihak luar. Program dari divisi *outreach* adalah mengadakan diskusi, seminar, atau workshop secara mandiri atau pun dengan instansi lain. Lalu, ada divisi *direct action* yang merupakan

perancang, pengeksekusi, dan pengevaluasi aksi-aksi XR Indonesia, baik secara daring maupun luring. Divisi ini juga memfasilitasi ide-ide aksi dari anggota lainnya.

Selanjutnya, ada divisi *social media* yang bertugas untuk mengelola dan membuat konten-konten menarik juga konten informatif di akun-akun sosial media yang dimiliki XR Indonesia (@extinctionrebellion.id dalam instagram) dengan cara mengelola publikasi dan komunikasi, mengumpulkan atau memproduksi konten foto, video, dan konten tertulis, dan memonitor, mendengarkan, dan merespons masukan dari audiens XR di sosial media.

Terdapat juga divisi *wellbeing* yang berfokus pada internal XR Indonesia. Divisi ini menjaga kultur dalam XR serta memantau kesehatan mental para anggota. *Wellbeing* bertugas untuk menyambut dan memberikan *briefing* ke anggota baru di dalam *family group* maupun *local group* baru yang membutuhkan. Program divisi ini juga mencakup perencanaan, pengeksekusian, dan pengevaluasian sesi *Regen* atau pemilihan koordinator baru setiap tiga bulan sekali.

Terakhir, ada divisi *art* yang bertugas untuk membungkus pergerakan XR Indonesia dengan seni dan

karya, seperti membuat karya seni atau pun pameran bertemakan krisis iklim secara aktif.

Berlanjut yang **kedua** dalam keanggotaan XR Indonesia, terdapat *local chapter*. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, XR merupakan gerakan desentralisasi. Setiap individu, kelompok, atau pun kota dan negara boleh dan bebas membentuk XR-nya masing-masing. Di Indonesia, *local chapter* merupakan kelompok kota-kota yang membentuk XR. *Local chapter* dibutuhkan untuk memfokuskan keadaan darurat apa yang sedang dihadapi di setiap kota atau daerah sehingga suatu kota atau daerah bisa langsung bergerak membawa isunya masing-masing tanpa perlu berbelit birokrasi atau menunggu persetujuan XR nasional.

Sampai Oktober 2021, terdapat 17 kelompok *local chapter*, yaitu XR Bandung, XR Bekasi, XR Bengkulu, XR Garut, XR Jakarta, XR Jawa Timur, XR Karawang, XR Makassar, XR Meratus, XR Semarang, XR Surabaya, XR Tangerang, XR Sumatra Selatan, XR Bunga Terung Kaltim, XR Polewali Mandar, XR Bali, dan XR Papua.

Ketiga, *Family group*. Kelompok ini merupakan kelompok besar yang berisi seluruh individu dari berbagai daerah dengan ragam rentang usia. Siapa pun yang berprinsip dan bertujuan sama dengan XR

Indonesia dapat masuk menjadi anggota *family group*. Dalam *family group*, semua orang bebas masuk ataupun keluar kelompok, begitu pun dengan arus informasi. Keresahan, informasi lapangan, informasi terkini, dan lainnya dapat diunggah dan dibagikan di dalam kelompok tersebut.

PEMBANGKANGAN SIPIL TANPA KEKERASAN

Untuk mencapai tujuannya, XR Indonesia membutuhkan strategi dalam bergerak. Suharko dalam Gerakan Sosial Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan [I.E. Tantangan] Gerakan Sosial di Indonesia oleh Heri Setiono dan Fadillah Putra (2006), menjelaskan terdapat empat variasi strategi gerakan, yaitu ***pertama*** strategi isolasi politik (*low profile strategy*) adalah strategi yang digunakan gerakan sosial secara sadar untuk mengisolasi diri, menghindari, bahkan memutuskan hubungan dengan agen-agen negara untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan yang otoritarian. Ruang lingkup dari strategi ini ada pada tingkat lokal, dimana gerakan berbasis komunitas aktif mengorganisir, mengembangkan, dan mengelola kelompok sosial berdasarkan sumber daya lokal.

Kedua, strategi pelapisan (*layering*) adalah strategi yang digunakan gerakan sosial untuk menghindari aksi dan intervensi langsung dengan cara bergerak dalam pengembangan penyediaan pelayanan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan sehingga agen-agen negara melihat suatu gerakan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan. Ruang lingkup dari strategi ini adalah gerakan yang berada di negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintahan.

Ketiga, strategi advokasi adalah strategi utama yang paling banyak digunakan, baik di negara maju maupun berkembang. Strategi ini biasanya digunakan untuk mendesak perubahan-perubahan sosial, seperti reformasi tata pemerintahan, melindungi sumber daya alam dan lingkungan, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, menciptakan dan memelihara perdamaian di daerah-daerah rawan konflik, dan lain-lain. Dalam kata lain, strategi ini efektif digunakan gerakan jika tujuannya untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah.

Keempat, strategi keterlibatan kritis (*critical engagement*) adalah strategi yang mengombinasikan strategi advokasi dengan peluang kerja sama dengan pihak luar sehingga suatu gerakan bisa menghadapi lawan yang lebih besar, seperti agen-agen negara

atau pun masyarakat luas. Oleh karena itu, bisa saja suatu gerakan mencoba bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu negara, parlemen, militer, maupun masyarakat luas untuk memengaruhi sudut pandang dan mencapai tujuan bersama.

Secara metode strategi, gerakan sosial baru bersifat menjauhi aksi kekerasan dan hal ini diterapkan oleh XR. Metode perlawanan *non-violence* atau nir-kekerasan diadaptasi dari karya Erica Chenoweth dan Maria Stephan (2011), yang berpendapat bahwa protes tanpa kekerasan secara historis lebih berhasil daripada protes dengan kekerasan. Selain itu, Erica Chenoweth (2011) juga menegaskan dalam penelitiannya bahwa gerakan besar akan berhasil jika 3,5% populasi ikut bergerak dan bersuara secara konstan, secara terus-menerus.

Lebih lanjut, salah satu anggota pendiri dari XR, Roger Hallam (2019) menuliskan bahwa strategi yang dilakukan oleh XR didasarkan pada tiga pengamatan utama. **Pertama**, gerakan protes perlu mengganggu atau mendisrupsi untuk mendapatkan perhatian dari publik. **Kedua**, para aktivis gerakan ini harus rela berkorban agar pihak ketiga mulai menanggapi dan memulai dialog serius. **Ketiga**, gerakan ini harus didasarkan pada asas saling menghargai dalam

mengawal dan membangun opini publik mengenai masalah yang sedang diadvokasikan.

Dasar tersebut diimplikasikan secara langsung menjadi pondasi taktik XR di seluruh dunia, yang berfokus pada kelompok besar yang melakukan pelanggaran hukum, untuk konteks meresahkan masyarakat, tanpa ada cara kekerasan dalam suatu periode yang sedang berlangsung. Taktik ini dilakukan untuk menimbulkan disrupsi ekonomi, dimana hal ini dirancang untuk mengguncang sistem politik dan gangguan sipil. Semua ini sengaja dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan kesadaran akan pentingnya isu yang sedang dibawa dapat mulai didiskusikan secara serius di tingkat publik (Hallam, 2019).

Hal ini terefleksi langsung dari pergerakan pertama XR di Inggris. Para pegiat XR melakukan aksi secara terus-menerus menggunakan metode “*mass arrest*” dengan tujuan mendisrupsi dengan cara radikal seperti memblokade jalan utama atau jembatan sampai semua aktivis ditangkap polisi. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian publik dan membuat pemerintah kewalahan sendiri.

Dalam hal ini, strategi gerakan yang digunakan oleh XR adalah strategi isolasi politik (*low profile strategy*), dimana XR secara sadar mengisolasi diri, menghindari, bahkan memutuskan hubungan dengan pemerintah untuk menghindari kooptasi dan mencoba untuk mendisrupsi mereka untuk mencapai tujuannya.

Meskipun Hallam berpendapat bahwa pondasi taktik dari *Extinction Rebellion* adalah disrupsi secara massif dan strategi yang digunakan adalah strategi isolasi politik, hal ini tidak dapat diterapkan langsung di Indonesia. XR Indonesia perlu menggunakan strategi yang berbeda, meski dasar metode yang digunakan tetap nir-kekerasan.

“Melihat sejarah kita dan realita sekarang, siapa yang mau ditangkap? Taktik Indonesia lebih ke pemaparan dulu, mengapa harus deklarasi krisis iklim. XR Indonesia mencoba untuk melihatkan fakta-fakta kalau sistem yang sekarang tetap diteruskan, Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Alhasil aksi yang XR lakukan bersifat unik, seperti menari bersama, membuat mural, dan hal-hal lain guna mengambil perhatian publik dan pemerintah.” (Mellisa, 30 Juni 2021).

Keadaan masyarakat yang belum familiar dengan isu krisis iklim membuat strategi XR Indonesia berfokus terlebih dahulu dalam memunculkan kesadaran masyarakat akan isu yang dibawa. Pendekatan yang

lebih dekat dengan kehidupan masyarakat digunakan agar pembahasan isu iklim bisa masuk ke ruang-ruang lingkup pembicaraan masyarakat sehari-hari.

“Jadi bukan hanya perihal hutan gundul atau langit abu, tetapi fakta tentang kehidupan sehari-hari yang pasti terdisrupsi akibat krisis iklim.” (Melissa, 30 Juni 2021).

XR Indonesia memulai pergerakannya melalui forum-forum kecil di tatanan akar rumput. Forum pertama yang dibentuk adalah diskusi terbuka XR Indonesia, “Menuju Kepunahan (dan Apa yang Bisa Kita Lakukan Tentang Itu),” pada tanggal 10 Agustus 2019 di Workwell Labs Kemang. Forum ini berdiskusi perihal kondisi iklim dan penyamaan persepsi dalam menyikapi situasi saat ini.

“Semua orang bisa membantu. Orang-orang yang sudah paham krisis iklim bisa membicarakan perihal krisis iklim di lingkarannya masing-masing dan orang yang di lingkaran mereka bisa membicarakannya lagi di lingkaran lainnya.” (Melissa, 30 Juni 2021).

Ruang-ruang diskusi *online* pun tumbuh, terlebih karena adanya larangan berkerumun dari pemerintah akibat wabah Covid-19 yang membuat ruang-ruang bergerak harus berpindah ke dunia maya. Diskusi seperti Climate Talk 101 diadakan beberapa kali dalam

sebulan untuk membahas kondisi iklim saat ini dan hal mendasar apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu.

Sementara itu, diskusi XR Hangout diadakan beberapa kali juga dalam sebulan, namun topik pembahasan berupa pengenalan dasar mengenai XR Indonesia dan diskusi antar individu perihal kondisi masing-masing dalam menghadapi tantangan krisis iklim terkini.

Forum-forum kecil XR Indonesia membuahkan hasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Bertambahnya *local chapter* membuat XR Indonesia semakin luas. Pada tanggal 20 Agustus 2020, XR Indonesia memulai aksi turun ke jalan pertama yang diadakan langsung di dua kota, yaitu *Shoe Strike* atau Aksi Sepatu. Aksi ini dilakukan di Jakarta dan Jogja. Dihadiri kurang lebih lima sampai sepuluh orang pada setiap kota, Aksi Sepatu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan tetap menjaga jarak. Sepatu-sepatu yang sudah dikirimkan dijadikan simbol utama, dimana aksi sepatu ini ingin menegaskan bahwa di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, menuntut keadilan iklim tidak akan terhenti dan terputus meski terhalang kendala pandemi.

Dari aksi tersebut, XR Indonesia berhasil menyentuh lapisan masyarakat secara lebih luas. Aksi Sepatu mendapat respons yang baik dari masyarakat. Kita bisa melihat lautan sepatu yang disimbolkan sebagai pengganti kerumunan manusia. Aksi ini juga awalan yang baik untuk orang-orang yang tidak biasa atau tidak familiar dengan aksi jalanan untuk tetap bisa bersuara karena tak hanya sepatu-sepatu yang dikirim ke XR, tetapi juga pesan-pesan yang sudah ditulis oleh masyarakat dari rumah masing-masing dijejerkan berdampingan dengan sepatu. Setelah adanya aksi sepatu, gerakan XR Indonesia mulai banyak dikenal di khalayak luas. Setelah itu, sepatu-sepatu yang ada disumbangkan oleh XR Indonesia.

Aksi kedua adalah *Toy Strike* atau Aksi Mainan yang diadakan bertepatan dengan hari anak sedunia pada tanggal 20 November 2020. Aksi ini dilakukan di tiga kota, yakni Jakarta, Malang, dan Makasar. Sekali lagi, dengan protokol pembatasan akibat pandemi Covid-19 yang masih mewabah, kali ini masyarakat bisa mengirim mainan kepada XR Indonesia sebagai representasi mereka turun ke jalan.

Mainan kanak-kanak menjadi simbol utama dalam aksi ini. Membawa isu antar generasi, mainan menyimbolkan bahwa yang turun ke jalan bukan

hanya remaja dan orang dewasa, tetapi juga anak-anak, sebagai generasi mendatang, yang akan terkena dampak dari krisis iklim apabila pemerintah tidak kunjung tegas dalam mengambil sikap di masa kini. Keseriusan XR Indonesia untuk merambah ke tatanan masyarakat yang lebih luas juga diperkuat dengan kehadiran XR *Youth* Indonesia, dimana anak-anak dan remaja dapat mengekspresikan dan bergerak dalam mengembangkan isu krisis iklim dari kaca mata mereka.

Naik dan turunnya angka penyebaran Covid-19 membuat XR Indonesia tidak bisa secara berkala turun ke jalan sehingga diskusi-diskusi dilakukan *online* secara rutin, dimana penulis mengikutinya sebanyak dua kali. Seperti pada tanggal 17 Agustus 2021, XR Indonesia membuat XR 101. Berdasarkan hasil observasi, diskusi selalu diawali dengan pengenalan nama dan penggambaran keadaan diri anggota forum diskusi pada saat itu. Lalu, moderator dari XR Indonesia akan mengawali dengan presentasi singkat perihal keadaan iklim terkini, sejarah XR secara singkat, dan mengapa anggota forum perlu segera bergerak atas isu krisis iklim saat ini. Setelah itu, sesi diskusi pun dibuka.

Diskusi dilakukan untuk mengenalkan kembali XR Indonesia kepada peserta yang saat itu berjumlah kurang lebih 15-20 orang. Dengan dibukanya ruang

diskusi *online*, individu-individu diharapkan bisa membawa topik obrolan hari itu kepada lingkungan sekitarnya.

Begitu pun dengan XR 101 pada tanggal 23 Agustus 2021, diskusi *online* di sini dimulai dengan perkenalan nama dan penggambaran keadaan diri masing-masing anggota forum. Yang menjadi pembeda dengan XR 101 pada tanggal 23 Agustus 2021 ialah materi kali ini dibawakan oleh XR *Youth*, dimana materi diskusi dikaitkan secara lebih dekat dengan isu anak muda, seperti apa yang bisa dilakukan anak SMA dalam mengawali isu krisis iklim.

Selain itu, media sosial menjadi bagian penting dalam strategi XR Indonesia. Keterbatasan ruang akibat Covid-19 membuat XR Indonesia semakin gencar mengedukasi melalui media sosial, terutama melalui Instagram. Dari bulan Mei hingga Oktober 2021, @extinctionrebellion.id, akun instagram XR Indonesia, telah mengunggah 97 postingan dengan jumlah likes kurang lebih 500-4000 likes yang bukan saja menyebarkan informasi seputar XR Indonesia, melainkan menjadi media untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai krisis iklim.

Seperti pada unggahan-unggahan bulan Mei 2021, XR Indonesia menjelaskan perusahaan mana atau siapa saja yang turut membiayai aktivitas yang memperparah krisis iklim. Untuk bulan Juni 2021, media sosial XR Indonesia berfokus kepada data-data lapangan krisis iklim di Indonesia dengan membuat *tagline* “Juni Bulan Perlawanan,” yang menceritakan keadaan lapangan, seperti naiknya air laut di beberapa daerah atau perampasan lahan dalam konflik agrarian. Kerja sama pun banyak dilakukan melalui fitur live dalam Instagram, seperti dengan @toraja_tolak_tambang_ dalam live Cerita Gelana di Tana Toraja, dengan @xrsumsel dalam live Menengok Esensi Lahan Gambut, dengan @jatamkaltim dalam live Masyarakat Adat Terusik Tambang, dan dengan @damaipangkaldamai dalam live Aksi Nirkekerasan Dalam Gaung Krisis Iklim.

Pada bulan Juli 2021, unggahan-unggahan XR Indonesia lebih banyak menyoroti kembali mengapa masyarakat luas perlu bertindak sekarang melawan sistem yang melanggengkan krisis iklim. Bulan Agustus 2021, XR Indonesia mengulas kembali makna merdeka dan menggarisbawahi Merdeka dari Krisis Iklim. Setelah itu, di bulan September dan Oktober 2021, XR Indonesia memulai merangkum sepekan iklim Indonesia

yang berisikan berita-berita terkini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan krisis iklim dalam sepekan dan melanjutkan unggahan kajian-kajian, alasan, dan penjelasan latar belakang XR Indonesia.

Melihat cara-cara yang dilakukan XR Indonesia, dapat disimpulkan XR Indonesia menggunakan strategi keterlibatan kritis (*critical engagement*) dalam strateginya memperjuangkan isu krisis iklim. Selain menggerakkan aksi yang dibuatnya, XR Indonesia juga turut bekerja sama dengan pihak luar.

“Di Indonesia, mayoritas orang bekerja di pemerintahan memang tidak mengerti situasi sehingga taktik XR adalah berusaha untuk memaparkan kalau kebijakan yang selama ini dibuat merugikan mereka sendiri secara lebih luas lagi. Pun demikian dengan pemilik usaha. Seperti pemilik tambang, kalau tambangnya tenggelam kan rugi juga mereka tidak bisa beroperasi dan itu yang sudah terjadi di Kalimantan Selatan. PLTU kehabisan batu bara karena tambangnya tenggelam dan mati listrik untuk jangka waktu lama.” (Melissa, 30 Juni 2021).

XR Indonesia terlihat hadir dalam mengikuti aksi-aksi aliansi Jeda Untuk Iklim yang merupakan aliansi dari kelompok-kelompok yang membawa isu iklim dan lingkungan. Begitu pun dengan kerja sama dengan

instansi lain, termasuk pemerintah. XR Indonesia tetap menerima peluang kerja sama secara terbuka.

KESIMPULAN

Gerakan sosial merupakan fenomena baru dalam lingkup pergerakan krisis iklim di Indonesia. Dengan bentuk gerakan sosial baru yang terdesentralisasi, XR Indonesia mampu menyentuh lapisan masyarakat secara lebih luas dengan struktur keanggotaan yang fleksibel dan cair, membuat gerakan bersifat lebih dekat dengan siapa saja.

Metode nir-kekerasan menjadi pondasi penting dalam pergerakan XR. Namun, strategi yang digunakan XR Indonesia berbeda dengan strategi yang dipakai XR Pusat karena konteks lingkungan yang berbeda. XR Indonesia menggunakan strategi keterlibatan kritis atau *critical engagement*, dimana XR Indonesia tetap berusaha menghindari kooptasi, tetapi tidak menutup peluang kerja sama untuk diskusi terbuka perihal krisis iklim sehingga strategi ini merupakan strategi yang efektif sebagai awalan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu yang diangkat. Berbeda dengan XR pusat yang bisa langsung menggunakan strategi isolasi politik (*low profile strategy*), dimana kesadaran

masyarakat sudah lebih luas dan tujuan utama XR bisa langsung dilakukan dengan taktik penangkapan massal.

Aksi-aksi yang dipilih oleh XR Indonesia pun memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian publik. Dengan strategi keterlibatan kritis, XR Indonesia dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat melalui kerja sama antar gerakan atau pun instansi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan XR Indonesia dalam kerja sama aksi yang dilakukan oleh aliansi gerakan-gerakan mendukung lingkungan hidup lainnya dan semakin bertumbuhnya *local chapter* yang ada di Indonesia. Kendatipun demikian, strategi ini perlu diulas kembali keefektifannya untuk tujuan lain *Extinction Rebellion* Indonesia, yaitu mendesak pemerintah untuk mendeklarasikan krisis iklim.

Penelitian ini berusaha memantik *Extinction Rebellion* Indonesia dalam memetakan strategi selanjutnya agar bisa lebih menyasar tujuan yang sudah terbentuk. Sebab penelitian ini merupakan pengamatan awal, diharapkan penelitian ini bisa memicu tulisan-tulisan yang bisa mendukung, mengoreksi, atau bahkan membantah argumentasi yang telah dipaparkan.

REFERENSI

- Situmorang, Abdul Wahib. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agreement, P. (2015). Paris Agreement. In *Report of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (21st Session, 2015: Paris)*. Retrived December (Vol. 4, p. 2017).
- Benford and Snow, David. (2000). “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, *Journal Annu. Rev. Sociol.* Vol. 26:611–39, Hal. 4.
- Booth, E. (2019). Extinction Rebellion: Social work, Climate Change and Solidarity. *Critical and Radical Social Work*, Vol. 7, No. 2, Hal. 257– 261.
- Devdiscourse. (2018). London: Thousand of climate change protests block fiver bridges over River Thames. *evdiscourse.com*. <https://www.devdiscourse.com/article/science-environment/257636-london-thousand-of-climate-change-protests-block-fiver-bridges-over-river-thames>. Diakses 27 April 2022 pukul 19.03.

- Rebellion, Extinction. (2021). *Panduan Pergerakan XR Indonesia*. <https://drive.google.com/file/d/1wXlKkmINqmdvbpLtjvA7R6pSOXcLgMfe/view>. Diakses 24 Agustus 2021 pukul 12.29.
- Gigih, Yongky Prasisko. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 3 No. 2, Hal. 9-16.
- Gilding, P. (2019). *Climate Emergency Defined (1st ed.)*. Melbourne: Breakthrough - National Centre for Climate Restoration.
- Ginanjari, W.R. & Mubarrok, A.Z. (2020). Civil Society and Global Governance: The Indirect Participation of Extinction Rebellion in Global Governance on Climate Change, *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* Vol. 1, No. 1, Hal. 41-52.
- Gready, P. & Robins, S. (2017). Rethinking Civil Society and Transitional Justice: Lessons from Social Movements and 'New' Civil Society. *International Journal of Human Rights*, Vol. 21, No. 7, Hal. 956–975.
- Gunningham, N. (2019). Averting Climate Catastrophe: Environmental Activism, Extinction Rebellion and Coalitions of Influence. *King's Law Journal*, Vol. 30, No. 2, Hal. 194-202.

- Hallam, R. (2019). Common Sense to the 21st. *rogerhallam.com*. Century https://www.rogerhallam.com/wpcontent/uploads/2019/08/Common-Sense-forthe21stCentury_byRogerHallamDownload-version.pdf. Diakses 12 September 2021 pukul 13.53.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta (ID): Sekretaris Negara.
- Indonesia, R. (2020). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta (ID): Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kimball, L. A., Haas, P. M., Keohane, R. O., & Levy, M. A. (1996). Institutions for the Earth. Sources of Effective International Environmental Protection. *The American Journal of International Law*, Vol. 90, No. 4, Hal. 701-702.
- Republika. (2017). Ribuan Pulau Kecil akan Tenggelam pada 2030. *republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/otgqab374/ribuan-pulau-kecil-akan-tenggelam-pada-2030>.
- Setiono, Heri & Putra, Fadilah. (2006). *Gerakan Sosial Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi.

- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Skrimshire, S. (2019). Activism for End Times : Millenarian Belief in an Age of Climate Emergency Activism for End Times : Millenarian Belief in an Age of Climate Emergency. *Political Theology*, Vol. 20(6), Hal. 518-536.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Taylor, Matthew. (2020). The Evolution of Extinction Rebellion. *theguardian.com*. <https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/04/evolution-of-extinction-rebellion-climate-emergency-protest-coronavirus-pandemic>. Diakses 28 Mei 2021 pukul 10.00.
- Walhi. (2020). Lima Tahun Perjanjian Paris: Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serius dan Ambisius. *walhi.or.id*. <https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serius-dan-ambisius>. Diakses 04 Juli 2021 pukul 09.34.

